

Abstrak

Manajemen keuangan negara yang penuh tanggung jawab merupakan fondasi krusial dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu indikator untuk mengevaluasi dan memantau manifestasi nyata dari tanggung jawab ini adalah Rencana Penarikan Dana (RPD) yang terdapat di halaman III DIPA. Penelitian ini berfokus pada RPD di Kepolisian Resor (POLRES) di Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan yang berada di bawah layanan KPPN Solok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme RPD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2017 serta mengukur konsistensi realisasi belanja dan tingkat deviasi RPD pada POLRES di wilayah KPPN Solok. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang diterapkan telah sesuai dengan peraturan, namun terdapat masalah berupa keterlambatan pemutakhiran data RPD. Penelitian ini juga menemukan adanya inkonsistensi dalam realisasi belanja yang terlihat dari deviasi kumulatif setiap satuan kerja yang melebihi batas 5%. Hal ini mempengaruhi kualitas IKPA KPPN Solok, di mana kualitas yang buruk menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang kurang baik. Kinerja anggaran yang buruk akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

Kata kunci: Manajemen Kas Pemerintah, Rencana Penarikan Dana, Deviasi, Realisasi Belanja

Abstract

Responsible financial management of the state is a crucial foundation in the administration of national finances. One of the indicators for evaluating and monitoring the tangible manifestation of this responsibility is the Cash Withdrawal Plan (RPD) found on page III of the DIPA document. This study focuses on the RPD in the Police Resorts (POLRES) in Solok City, Solok Regency, and South Solok Regency, which are under the services of KPPN Solok. The aim of this research is to understand the RPD mechanism based on the Ministry of Finance Regulation Number 197 of 2017 and to measure the consistency of expenditure realization and the deviation rate of RPD in POLRES within the KPPN Solok area. The research method employs a qualitative approach through interviews. The results indicate that the implemented mechanism complies with the regulations; however, there are issues regarding the delayed updating of RPD data. The study also found inconsistencies in expenditure realization, as evidenced by cumulative deviations in each work unit exceeding the 5% limit. This affects the quality of IKPA KPPN Solok, where poor quality indicates subpar budget execution performance. Poor budget execution performance will impact economic growth and public services.

Keywords: Government Cash Management, Cash Withdrawal Plan, Deviation, Expenditure Realization